

REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BOYOLALI CAPAI 101,83 PERSEN DARI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/05/31/IMG_20240531_152623-2317639804.jpg

Isi Berita:

ERAPOS ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menggelar sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Boyolali, Marsono, Jum'at (31/05/2024), di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Boyolali tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023

Bupati Boyolali, M Said Hidayat, menyampaikan bahwa salah satu upaya konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah LKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Said Hidayat memaparkan, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.444.305.229.951 atau sebesar 101,83 dari anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 2.400.472.813.000.

"Sedangkan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.026.442.161.445 atau 95,17 persen dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 2.129.317.996.000", terang M Said.

Sementara itu, lanjut M Said, realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 407.363.094.000 atau 99,49 persen dari anggaran transfer setelah perubahan sebesar Rp. 409.440.287.000

“Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2023 ini Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga tercatat dari tahun 2011 sampai saat ini Boyolali telah mendapatkan Opini WTP BPK sebanyak 13 kali berturut-turut”, terang M Said.

Terkait dengan Realisasi penerimaan pembiayaan tahun Tahun Anggaran 2023, M Said mengatakan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 159.785.469.819 atau 100 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 159.785.470.000.

"Untuk realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 21,5 Miliar atau 100 persen dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 21,5 Miliar sehingga terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp. 138.285.469.819", terang M Said.

Kemudian, imbuh M Said, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 148.785.444.325 berasal dari surplus Anggaran sebesar Rp. 10.499.974.506.

Sementara itu, lanjut M Said, untuk catatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca Daerah tahun 2023 yakni Jumlah Aset sebesar Rp. 4.914.610.084.873,63.

"Kemudian jumlah Kewajiban sebesar Rp. 41.118.308.163,53, sedangkan jumlah Ekuitas sebesar Rp. 4.873.491.776.710,10 dan jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 4.914.610.084.873,63", pungkask M Said. (Adang Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034711529/realisasi-pendapatan-kabupaten-boyolali-capai-10183-persen-dari-anggaran-setelah-perubahan>, “Realisasi Pendapatan Kabupaten Boyolali Capai 101,83 Persen Dari Anggaran Setelah Perubahan”, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://boyolali.go.id/news/bupati-said-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023>, “Bupati Said Sampaikan Rapenda Pertanggungjawaban APBD 2023”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05